

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.7492/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 30 Agustus 2022

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710.

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan *Unaudited*  
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. ("Perseroan")  
Per 30 Juni 2022**

Dengan hormat,

Dalam rangka mematuhi Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyampaikan Bukti Iklan Laporan Keuangan *Unaudited* per tanggal 30 Juni 2022 yang dimuat di surat kabar Investor Daily pada tanggal 30 Agustus 2022.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**  
Sekretariat Perusahaan,



**Purba Yudha Tama**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth:

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI.
2. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia.
3. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

# Kebijakan PE Sawit Gratis Berlaku hingga 31 Oktober 2022

JAKARTA, ID – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan kebijakan penghapusan pungutan ekspor (PE) sawit hingga 31 Oktober 2022. Salah satu tujuan perpanjangan masa berlaku ketentuan PE gratis tersebut adalah menjaga agar tren kenaikan harga tandan buah segar (TBS) tetap bertahan sehingga bisa mengurangi kerugian para petani sawit di Tanah Air.

Oleh Tri Listiyarini

Pemerintah menerapkan PE sawit gratis melalui PMK No 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas PMK No 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Dalam PMK No 115/PMK.05/2022 tersebut, tarif PE yang berlaku untuk semua produk minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) dan turunannya menjadi sebesar US\$ 0, kebijakan tersebut berlaku mulai 15 Juli 2022 sampai 31 Agustus 2022.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melalui Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap berkomitmen mendukung industri kelapa sawit berkelanjutan dan menyokong subsektor perkebunan sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Karena itu, dalam rapat Komite Pengarah BPDPKS pada Minggu (28/8) diperoleh keputusan yang menyetujui lima hal, di antaranya perpanjangan tarif PE sebesar US\$ 0 untuk semua produk sampai 31 Oktober 2022. "Perpanjangan tarif PE sebesar US\$ 0 itu untuk menjaga momentum saat ini, yang mana harga CPO mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga TBS yang mulai meningkat, sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya," ujar Airlangga.

Keputusan pemerintah tersebut sesuai dengan harapan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Sebelumnya, Sekjen Gapki Eddy Martono mengatakan, pihaknya telah menyampaikan usulan kepada pemerintah melalui Menteri Perdagangan, salah satu anggota Komite Pengarah BPDPKS, untuk memperpanjang PE sawit gratis hingga akhir Oktober 2022. Salah satu alasan Gapki adalah agar harga TBS petani tidak anjlok lagi begitu PE sawit kembali diberlakukan secara normal. Apalagi, saat ini, harga CPO di pasar internasional juga masih tinggi, yakni sekitar US\$ 1.100 per ton.

## Alokasi Biodiesel

Selain perpanjangan kebijakan PE sawit gratis,



## KKP Selamatkan Kerugian Negara Sebesar Rp 30 M dari Tindak Penyelundupan BBL

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, menyampaikan kegagalan penyelundupan BBL yang merupakan sinergi antara Pangkalan PSDKP Batam, Lanal Batam, Bea Cukai, Imigrasi, Dit. Pol Air Polda Kepri, dan Bakamla di sela jumpa pers di Jakarta, kemarin. Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Hiu Biru 02, Pangkalan PSDKP Batam berhasil mengamankan BBL (Benih Bening Lobster) sebesar Rp 30 miliar berasal dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang akan diselundupkan keluar Indonesia melalui perairan Pulau Sambu, Kepulauan Riau, menuju ke Singapura pada Minggu (28/08). Diketahui, terdapat 65 boks BBL yang diamankan, dengan rincian total 300.000 ekor BBL yang terbagi menjadi dua jenis yaitu, 288.000 ekor jenis BBL Pasir dan 12.000 ekor jenis BBL Mutiara. Dengan demikian, KKP menyelamatkan kerugian sebesar Rp 30 miliar dari tindak penyelundupan BBL.

empat keputusan Komite Pengarah BPDPKS lainnya adalah penambahan alokasi biodiesel tahun 2022, pembangunan pabrik minyak makan merah (3M), dukungan percepatan peningkatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR). "Peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat diproyeksikan menyebabkan kenaikan permintaan minyak solar pada triwulan IV-2022. Karena itu, kecukupan biodiesel sebagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume biodiesel tahun ini, yakni dari yang semula 10.151.018 kiloliter (kl) menjadi 11.025.604 kl," jelas Airlangga dalam keterangan

resmi Kemenko Perekonomian, kemarin.

Sementara untuk meningkatkan keberterimaan sawit RI di pasar dunia, Komite Pengarah BPDPKS sepakat mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO, di antaranya dengan menempatkan Sekretariat ISPO di bawah BPDPKS serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO. Rapat itu juga meminta segera dilakukan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) guna mempercepat pelaksanaan program PSR serta memberi mandat kepada Kementerian Pertanian dan BPDPKS untuk segera melakukan studi terkait dana pendampingan PSR yang saat ini hanya sampai P0 menjadi TM1.

## Realisasi Belanja KKP TA 2021 Capai 98,89%



Sakti Wahyu Trenggono

JAKARTA, ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, realisasi belanja bersih sektor kelautan dan perikanan tahun anggaran (TA) 2021 mencapai 98,89% atau senilai Rp 4,72 triliun dari alokasi anggaran setelah revisi Rp 4,77 triliun. Persentase realisasi belanja bersih TA 2021 tersebut jauh lebih tinggi dari TA 2020 yang sebesar 91,27%.

Demikian disampaikan Menteri Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Pertanian guna membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2021 di Jakarta, Senin (29/8). "LK KKP disusun dan disajikan sesuai PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan," ujar Trenggono, kemarin.

Trenggono menambahkan, LK KKP TA 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan LHP BPK Nomor 10a/LHP/XVII/05/2022 tanggal 27 Mei 2022. Opini WTP itu menjadi langkah awal dalam perbaikan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan akurat. Sementara dari tujuh temuan dan 41 rekomendasi BPK, KKP telah menindaklanjuti seluruh temuan dan 13 rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh BPK RI, sisanya 28 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut sesuai rencana aksi hingga semester II-2022 sehingga dia optimis predikat tersebut masih bisa dipertahankan di tahun depan. Dalam rapat kerja itu, Komisi IV mengapresiasi opini WTP yang diberikan BPK kepada KKP serta mengusulkan peningkatan pagu anggaran TA 2023.

## Gagalkan Penyelundupan

Pada bagian lain, KKP berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 300 ribu benih bening lobster (BBL) atau benur senilai Rp 30 miliar ke Singapura lewat perairan Batam, Kepulauan Riau. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin menjelaskan, benur tersebut akan dibawa ke Singapura menggunakan *speedboat* dari wilayah pesisir pantai timur Sumatera lewat Pulau Sambu di Batam, Kepri.

Setelah dihitung, dilihat, dan dipilah, terdapat jenis lobster pasir 288 ribu ekor dan lobster mutiara 12 ribu ekor. "Dengan asumsi lobster pasir per ekor Rp 100 ribu dan lobster mutiara per ekor Rp 150 ribu, ditaksir dari 300 ribu BBL dari dua jenis lobster kurang lebih (nilainya) sekitar Rp 30 miliar," kata Adin.

Mengacu UU Perikanan pasal 88, setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RI dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. (dho)



## PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk. DAN ENTITAS ANAK

Gedung WIKa, Lantai 7-10, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340, Indonesia

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2022	31 Desember 2021		30 Juni 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>			<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
Kas dan Setara Kas	525.177.833.117	1.467.874.131.042	<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Piutang Usaha - Neto			Pinjaman Bank Jangka Pendek		
Pihak Berelasi	269.611.399.977	120.407.647.586	Pihak Berelasi	400.000.000.000	299.890.000.000
Pihak Ketiga	474.006.795.424	444.216.010.496	Pihak Ketiga	220.000.000.000	129.247.178.780
Piutang Retensi - Neto			Utang Usaha		
Pihak Berelasi	143.065.014.575	195.170.603.792	Pihak Berelasi	290.195.396.374	796.848.054.778
Pihak Ketiga	341.320.724.091	411.186.663.728	Pihak Ketiga	787.267.194.783	1.210.515.927.951
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja - Neto			Beban Akumulasi	385.125.831.703	455.616.241.090
Pihak Berelasi	351.843.757.698	258.201.732.306	Utang Pajak	35.887.293.918	7.099.998.798
Pihak Ketiga	634.887.191.534	345.552.310.190	Liabilitas Pajak Penghasilan Final	91.087.992.455	84.787.590.295
Piutang Yang Belum Ditagih	2.586.455.897	520.750.932	Liabilitas Jangka Pendek Yang		
Persediaan	361.370.583.322	323.408.407.224	Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun		
Pajak Dibayar di Muka	176.890.697.015	182.543.159.147	Uang Muka Pemberi Kerja dan		
Uang Muka	143.503.342.649	143.168.807.701	Konsumen	40.274.289.802	34.759.790.341
Biaya Dibayar di Muka	139.919.435.837	26.498.913.345	Pinjaman Bank	6.093.100.000	5.155.700.000
Pekerjaan dalam Proses			Utang Lain-lain		
Pihak Berelasi	399.496.384.201	305.292.785.417	Pihak Berelasi	35.601.356.596	32.257.105.595
Pihak Ketiga	334.228.400.048	232.540.169.869	Pihak Ketiga	6.830.564.726	6.804.625.099
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>4.297.908.015.385</b>	<b>4.456.582.092.775</b>	Pendapatan Diterima Di Muka	6.176.657.811	--
			<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>2.304.539.678.168</b>	<b>3.062.982.212.727</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Piutang Lain-Lain - Neto			Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi		
Pihak Berelasi	9.387.761.469	14.892.027.836	Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun		
Pihak Ketiga	13.516.957.474	13.772.961.897	Uang Muka Pemberi Kerja dan		
Tanah Akan Dikembangkan	36.588.650.000	36.588.650.000	Konsumen	911.411.679.985	421.401.781.186
Penyerahan Saham	127.296.062.692	127.296.062.692	Pinjaman Bank	97.751.200.000	101.032.100.000
Properti Investasi	258.188.600.000	258.188.600.000	Liabilitas Imbalan Kerja	5.983.843.552	6.992.013.883
Aset Kerja Sama	353.045.705.607	402.994.708.788	<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.015.146.723.537</b>	<b>529.425.895.069</b>
Aset Tetap - Setelah Dikurangi			<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.319.686.401.705</b>	<b>3.592.408.107.796</b>
Akumulasi Penyusutan	127.955.570.773	142.139.595.194			
Investasi pada Ventura Bersama	492.514.491.659	512.810.099.515	<b>EKUITAS</b>		
Aset Lain-lain	8.435.244.573	8.435.244.573	Modal Saham - Nilai Nominal Rp100		
Aset Pajak Tangguhan	299.182.738	299.182.738	Modal Dasar 38.000.000.000 saham		
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.427.228.226.985</b>	<b>1.517.417.133.233</b>	Modal ditempatkan dan disetor -		
			9.572.000.000 saham	957.200.000.000	957.200.000.000
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.725.136.242.370</b>	<b>5.973.999.226.008</b>	Tambahkan Modal Disetor	522.862.769.158	522.862.769.158
			Saldo Laba	137.664.287.000	116.274.287.000
			Ditentukan Penggunaannya	742.150.529.803	741.808.624.857
			Belum Ditentukan Penggunaannya	9.315.456.862	7.966.945.475
			Penghasilan Komprehensif Lainnya		
			Sub Jumlah	<b>2.369.193.042.823</b>	<b>2.346.112.626.490</b>
			Keperluan Non Pengendali	36.256.797.842	35.478.491.722
			<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.405.449.840.666</b>	<b>2.381.591.118.212</b>
			<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.725.136.242.370</b>	<b>5.973.999.226.008</b>

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN

KOMPRESIF LAIN

Untuk Periode Enam Bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni	
	2022	2021
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.183.700.155.035</b>	<b>1.355.728.663.731</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(1.072.421.357.997)</b>	<b>(1.235.589.838.407)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>111.278.797.038</b>	<b>120.138.825.324</b>
Beban Usaha	(37.085.140.757)	(36.837.584.923)
Pendapatan Lainnya	33.143.496.504	53.987.630.657
Beban Lainnya	(849.316.582)	(702.311.891)
Beban Keuangan	(20.502.832.194)	(27.441.087.854)
Beban Pajak Final	(37.906.430.174)	(39.280.631.663)
Bagian Laba Ventura Bersama	16.539.352.933	31.022.213.624
Laba Selisih Kurs-Neto	679.124.299	394.357.906
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>65.297.051.067</b>	<b>101.281.411.180</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>--</b>	<b>(60.000.000)</b>
<b>LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>65.297.051.067</b>	<b>101.221.411.180</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>SETELAH PAJAK</b>		
Pos-pos yang Tidak Akan		
Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Pengukuran Kembali		
Program Imbalan Pasti	1.348.511.387	--
Keuntungan Atas Nilai Pasar Saham	--	--
<b>Jumlah Pos-pos yang Tidak Akan</b>	<b>1.348.511.387</b>	<b>--</b>
<b>Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>66.645.562.454</b>	<b>101.221.411.180</b>
<b>LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE:</b>		
Pemilik Entitas Induk	64.518.744.946	100.926.528.433
Keperluan Non Pengendali	778.306.120	294.882.747
<b>Jumlah</b>	<b>65.297.051.067</b>	<b>101.221.411.180</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik Entitas Induk	65.867.256.333	100.926.528.433
Keperluan Non Pengendali	778.306.120	294.882.747
<b>Jumlah</b>	<b>66.645.562.454</b>	<b>101.221.411.180</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM</b>	<b>6,74</b>	<b>10,54</b>

### Catatan:

- Informasi keuangan di atas pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit.
- Informasi keuangan di atas pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, member of the RSM network, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material.
- Informasi keuangan di atas pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, member of the RSM network, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material.

Jakarta, 30 Agustus 2022  
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk  
S.E. & O  
DIREKSI